

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- A. Ichsan, *Hukum Perdata*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1967.
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Achmad Chulaemi, *Hukum agraria perkembangan macam-macam hak atas tanah dan pemindahannya*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1993
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Edisi 1, Cetakan Keempat Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Arnowo Hadi Waskito, *Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan)*, Penerbit Media Adji Internasional, Jakarta, 2015.
- Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1985.
- Bachtiar Effendi, *Kumpulan tulisan tentang hukum tanah*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Bambang Tri Cahyo, *Ekonomi Pertanahan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.
- C. Dewi Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Djoko Prakoso, Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi PRONA sebagai pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- Eddy Ruchiyat, *Sistem Pendaftaran Tanah sebelum dan sesudah berlakunya UUPA*, Penerbit Armico, Bandung, 1989.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Effendi Perangin, *Praktek Jual Beli Tanah*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Penerbit Arkola, Surabaya, 2003.
- Ismiyanto, *Metode Penelitian*, Penerbit P2U Unnes, Jakarta, 2003.
- Johara T. Jaya Dinata, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, perkotaan dan Wilayah*, ITB, Bandung, 1999.
- Kaban, Maria, *Keberadaan hak masyarakat adat atas tanah ditanah karo*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2004.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, cet. 2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Penerbit Bandar Maju, Bandung, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marhalnis Abdulhay, *Hukum Perdata material jilid II Cet 1*, Paramita, Jakarta 1984
- Maria SW. Soemardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Cetakan ke II*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Hypotheek*, Jakarta, 1978.
- Masri Singarimbun dkk, *Metode Penelitian Survei*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1989.
- Mr. B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Penerbit PT Pradnya Paramitra, Jakarta, 1991.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar , 2010.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pustaka Setia, 2011, Jakarta.
- R.Abdoel Djamali, et all, 1988, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Cetakan Pertama, Penerbit Putra A. Bardin, Bandung, 1988.
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1999.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, 2011, Jakarta.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan VII, Penerbit Sinar Grafika, 2005, Jakarta.
- R.Subekti dan Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit PT. Paramita, Jakarta, 1974.
- R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Sahat HMT Sinaga, *Jual Beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak*, Penerbit Pustaka Sutra, 2007.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika Jakarta, 2000
- Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta, 1998.

- Sihabuddin, dkk, *Perlindungan hukum bagi pembeli terhadap jual beli hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah tangan, (Studi Kasus di Kota Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Penerbit Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan akan Datang*, Penerbit Kencana, Jakarta 2017
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian*, Penerbit Institut Indonesia, Jakarta, 1993.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cetakan V, PT. Penerbit Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1959.
- Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (terjemahan oleh A. Soehardi), Penerbit Sumur Bandung, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesembilan, CV.Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Wiryono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1981.

B. Disertasi, Tesis.

- Syamsul Bahri, *Beberapa aspek Hukum adat yang berpengaruh terhadap Pendaftaran Tanah*, Desertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1987.
- Yulis Rizki, *Penyelesaian sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar*, Tesis, Pasacasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.

C. Artikel dalam Karya Ilmiah/Jurnal/Seminar/Simposium.

Avina Risma Dewi, *“Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di BawahTangan”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

Neriana, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Perjanjiaan Jual beli dihubungkan dengan Kewenangan Notaris Pasal 15 ayat (2) Undadng-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal JOM Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015.

N.G.Yudara, *Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Renvoi, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006.

D. Internet.

Erza Putri, *Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, 2019, <http://erzaputri.blogspot.com>., download pada tanggal 17 April 2020, jam 16.15 WIB.

E. Peraturan Perundang-undangan.

1. UUD 1945. (18B, Pasal 27 ayat (1), 28 H, 28 J, 33 ayat (3))
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Bidang Hukum, tertib hukum dan penegakan Hukum.
3. KUHPerdata;
4. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
5. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaiaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan hak atas tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 ttg Jabatan Notaris.
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
13. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1973 tentang Tatacara Penetapan Gantirugi oleh Pengadilan Tinggi.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan/ataau Bangunan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan/ataau Bangunan.
16. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU,HGB dan Hak Pakai.
18. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah terkait lainnya;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kemneterian ATR/Badan Pertanahan Naasional.

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
22. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
23. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung TA. 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Badan Pengadilan Khusus Rumusan Pleno Kamar Perdata.
24. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
25. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
26. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari juncto Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari.
28. Peraturan Nagari Pandai Sikek Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan adat istiadat Nagari Pandai Sikek.